

Pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat terhadap Strategi Bertahan Hidup Pedagang Makanan Tradisional di Wonogiri

Adistya Indrawan¹, Abdul Rahman², Yosafat Hermawan Trinugraha³

^{1*,2,3} Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: indrawanadistya@gmail.com¹, abdul.rahman@staff.uns.ac.id²,

yosafathermawan@staff.uns.ac.id³

Abstrak

Kebijakan PPKM merupakan sebuah regulasi yang lahir pada situasi pandemi Covid-19 yang sedang mengalami fase kritis pada saat itu. penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui keberjalanan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Wonogiri, (2) Mengetahui alasan mengapa pelaku usaha UMKM jajanan tradisional di lingkungan pasar Wonogiri memerlukan strategi bertahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, serta (3) Mengetahui strategi bertahan yang dilakukan pelaku usaha UMKM Jajanan Tradisional di lingkungan pasar Wonogiri pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data didapatkan dari hasil metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dari kurang lebih 20 informan yang terkait. Menggunakan teori James Scott dalam menganalisis data. Dengan teknik analisis melalui tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) pelaksanaan PPKM di Kabupaten Wonogiri dilaksanakan secara aman dan lancar namun ditemui pro dan kontra dalam pelaksanaannya. (2) para pedagang tidak langsung menyerah dalam situasi sulit karena mayoritas mereka sudah menjadikannya pekerjaan pokok lebih dari lima tahun, dan ketrampilan dasar yang mereka miliki hanya pada pengolahan makanan daerah. (3) strategi bertahan yang dilakukan oleh para berdagang digaris bawahi pada tiga point yang pertama mengikat sabuk lebih kencang, kedua alternatif subsistensi, dan yang ketiga kekuatan relasi.

Kata Kunci: PPKM; Strategi Bertahan Hidup; UMKM Makanan tradisional; Wonogiri

Abstract

The Community Activities Restrictions Enforcement (CARE) policy is a regulation emerging amidst the critical phase of the Covid-19 pandemic at that time. This research aims to (1) Discover the progress of Community Activities Restrictions Enforcement (CARE) in Wonogiri Regency, and (2) Identify the background of why the Micro, Small, Medium-Sized Enterprises (MSMEs) Traditional Food agents in the neighbourhood of Wonogiri's market town require a withstanding strategy at the time of Community Activities Restrictions Enforcement. The method of the research employs qualitative descriptive research by applying a phenomenological approach. The data are collected from the result of observation, interviews, and more or less 20 related informants' documentation. Furthermore, this research applies James Scott's theory in analyzing the data. The analysis techniques undergo three methods which are data reduction, data presentation, and conclusion. The results reveal that (1) The implementation of Community Activities Restrictions Enforcement (CARE) in Wonogiri Regency is executed safely. However, there are pros and cons to its implementation. (2) The merchants are resilient in a predicament situation as the majority of whom have considered it the main job for over

five years as well as the only basic skill they possess is local cuisine processing. (3) The withstanding strategy carried out by the merchants is highlighted in three points. Firstly is to “fasten the belt”, secondly is a subsistence alternative, and lastly is a relation.

Keywords: CARE; Survival Strategy; MSMEs Traditional Food; Wonogiri

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu bidang yang menjadi sendi utama dalam keberjalanan dan kestabilan suatu negara, bila laju ekonomi suatu negara terhambat maka akan mempengaruhi perkembangan di bidang lainnya. Ironisnya pada saat itu Indonesia masih belum menunjukkan titik terang dalam menyudahi pandemi ini, yaitu dilihat dari data yang sudah mencapai 418.375 kasus terkonfirmasi dengan jumlah total meninggal mencapai 14.146 jiwa (Satgas Covid-19, 2021). Bila kita analisis dari keterkaitan data tersebut terhadap ekonomi yaitu keterkaitan angka kelangsungan hidup yang tinggi akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi secara positif. Kemudian menjadi acuan bahwa dalam tren angka kematian yang tinggi ini akan mengakibatkan ekonomi di laju kontribusi negatif (Taufik, 2020). Penelitian ini akan berkontribusi dalam menjelaskan kebenaran pendapat ahli tersebut diatas.

Selanjutnya dapat kita lihat fenomena yang ada di dalam masyarakat melalui pemberlakuan regulasi PPKM yang telah dilaksanakan di masa pandemi ini, di mana menciptakan kondisi sebagai sebuah bentuk sebab akibat dalam adanya kebijakan tersebut. Dimulai dari tingginya angka PHK di mana menjadi salah satu pilihan untuk menyeimbangkan untung-rugi suatu perusahaan, tertahannya uang di bank dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita katakan dengan fenomena “economic shock”. Shock atau guncangan dalam lingkup dunia perekonomian menjadi gambaran di mana menjelaskan bahwa terdapat pengaruh ekonomi yang buruk baik secara perorangan, industri rumahan, ekonomi mikro, makro dan bahkan ekonomi dengan cakupan nasional maupun internasional. Dampak dari pandemi ini dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan yang banyak mengalami penurunan. Kedua point penting tersebut berujung pada keengganan masyarakat untuk memutar uang dalam jangka waktu sekarang ini (Sugiri, 2020). Pada sisi permintaan yaitu dapat dilihat fenomena berkurangnya kebutuhan akan jasa hingga kebutuhan konsumsi, misalkan bisnis yang berkaitan dengan perdagangan atau industri UMKM. Sehingga hal ini menyebabkan pelaku usaha tersebut kehilangan sumber pendapatan karena masyarakat atau penggunanya diharuskan untuk melakukan kegiatan dirumah pribadi secara mandiri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara umum adalah sektor ekonomi yang bergerak pada kegiatan informal dengan beberapa pola produksi barang atau jasa, berskala kecil, dan unit-unit produksinya dimiliki secara perorangan atau keluarga, dan memiliki karakteristik menggunakan tenaga kerja padat karya, dan penggunaan teknologi yang masih konvensional atau sederhana (Rumeon, 2020). Dari definisi tersebut, kekuatan UMKM sebenarnya merupakan sebuah sumber tenaga sebuah ekonomi masyarakat yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi kondisi ekonomi rakyat. Hal ini diyakini, sektor ekonomi UMKM berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat misalkan penyerapan barang mentah menjadi barang jadi atau pun penyerapan barang jadi menjadi barang konsumsi oleh masyarakat. Hal ini didasari juga dengan data bahwa hampir 49,8 juta tenaga kerja terserap melalui UMKM yang jumlah penyerapannya mencapai 99,99 % (Tanjung, 2018). Oleh karena itu jika UMKM mengalami terpaan musibah di masa pandemi ini hampir dapat dipastikan sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasakan efeknya.

Sedikitnya terdapat hampir 40% UMKM memutuskan untuk melakukan sebuah solusi darurat berupa pengurangan stok barang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar dan juga berlanjut pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sebagai akibatnya sebanyak 16,1% UMKM

memilih mengurangi tenaga kerjanya demi menjaga kesehatan ekonomi perusahaan atau usahanya. Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk nyata bagaimana dampak yang cukup besar yang di akibatkan regulasi dan juga situasi pandemi Covid-19 di Indonesia (Rosita, 2020).

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Sugiri (2020). Motivasi yang melatarbelakangi yaitu penelitian sebelumnya dirasa masih bersifat umum sehingga peneliti mencoba untuk memfokuskan permasalahan secara lebih terperinci yaitu pada kasus dampak pandemi pada UMKM yaitu usaha jajanan pasar. Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa pandemi berpengaruh pada pelemahan kegiatan ekonomi atau perputaran uang yaitu pada industri, rumah tangga, makro hingga mikro. Kemudian menghasilkan suatu pertimbangan dalam bagaimana strategi menghadapi krisis ekonomi seperti ini, yaitu diantaranya strategi jangka panjang dan jangka pendek.

Berdasarkan temuan data terkait kebijakan PPKM dan dampak kepada UMKM di Indonesia maka peneliti menggunakan tiga rumusan masalah antara lain bagaimana pelaksanaan PPKM di Kabupaten Wonogiri? setelah itu Mengapa pelaku usaha UMKM jajanan tradisional memerlukan strategi bertahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat? Lalu Bagaimana strategi bertahan pelaku UMKM jajanan rakyat di Wonogiri selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat?

Mengenai kebijakan Pembatasan masyarakat atau (PPKM) yang dilaksanakan sejak awal tahun 2021 yang secara langsung mempengaruhi mobilitas dan kegiatan masyarakat di Indonesia. Sehingga dari pemaparan tersebut penulis ingin melihat bagaimana strategi dan inovasi pengelola bisnis ini dalam mempertahankan keberjalanan dan eksistensi bisnisnya di masa pandemi ini. Dengan latar belakang tersebut maka penilitit akan mengangkat judul “Pengaruh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Strategi Bertahan Hidup Pedagang Makanan Tradisional Di Wonogiri”

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Prosedur yang dilalui dalam penelitian ini berupa proses persiapan, proses pengumpulan data dan proses analisis data, yang selanjutnya hasil penelitian dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan penelitian dan artikel ilmiah. Selanjutnya penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan melibatkan kurang lebih 20 Informan yang berkaitan pada kebijakan PPKM itu sendiri dan juga khususnya para pedagang makanan daerah di Kabupaten Wonogiri. Kemudian data sekunder untuk menunjang penelitian yang berasal dari kajian literature, berita acara, dan juga akun media sosial pihak terkait, dan lain-lainnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian untuk pengujian validitas data menggunakan triangulasi data yang didapatkan melalui hasil pengumpulan data. Lalu Teknik analisis data di dasarkan pada teknik menurut Miles dan huberman dalam (Sugiyono, 2013) yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

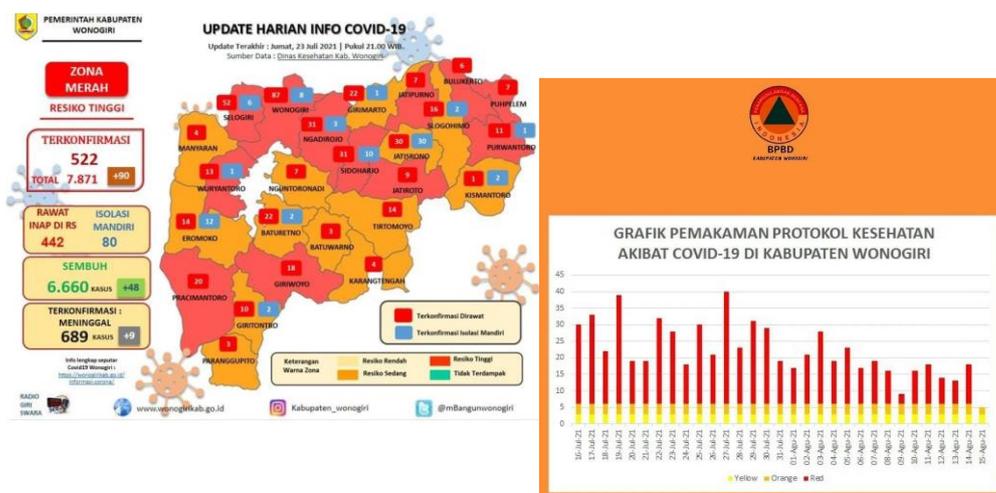
PEMBAHASAN

Pelaksanaan PPKM di Kabupaten Wonogiri

Berbagai dampak dari hadirnya pandemi Covid-19 di dunia khususnya di Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap seluruh kegiatan atau aspek kehidupan manusia, termasuk yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Wonogiri. Hal ini selaras dengan pendapat dari (Mawar, 2021) yaitu berbagai program, kebijakan, regulasi yang meliputi pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan pada bidang ekonomi, budaya, sosial dan lain sebagainya telah membuat berbagai perubahan yang besar di

kehidupan manusia. Kebijakan itu sendiri menurut Dworkin dalam (Mahadewi, 2021) merupakan sebuah standart dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut menuai pro dan konra mau tidak mau seluruh elemen masyarakat harus ikut mendukung dan menerapkan. Karena pada dasarnya regulasi mengenai PPKM ini adalah bentuk pelaksanaan hak asasi manusia mengenai kesehatan dan keselamatan untuk orang banyak dengan kepentingan menjaga rahmat Tuhan yang telah memberikan karunianya, sehingga manusia sepatutnya menjaga hal itu. (Mahadewi, 2021).

Secara khusus di Kabupaten Wonogiri, dalam peraturan tersebut Kabupaten Wonogiri masuk dalam kategori wilayah penyebaran Covid-19 di level 4 atau yang paling tinggi (Instruksi Gubernur Jawa Tengah, 2021; Satgas Covid-19, 2021). Dimana tingginya kasus penularan dan kasus kematian di daerah ini yang menjadi cukup gawat pada saat itu.



Gambar 1 dan 2 peta penyebaran Covid-19 di Wonogiri

Situasi dan kondisi yang cukup mengkhawatirkan membuat beberapa instansi terkait bekerja sama dan bekerja keras dalam melakukan program PPKM di Kabupaten Wonogiri, diantaranya Polisi, TNI, BPBD, tenaga kesehatan, dan juga beberapa relawan Pada saat itu hampir 25 Kecamatan di kabupaten di Wonogiri menjadi daerah zona merah bahkan di beberapa bagian daerah menjadi zona hitam (Instruksi Bupati, 2021). Pemakaman secara prokes hampir setiap hari dilakukan oleh pihak terkait dan masyarakat di seluruh bagian Wonogiri.

Berbagai Program yang dilakukan oleh pihak terkait didasarkan pada peraturan bupati yang mengatur PPKM pada saat itu, dimana BPBD menjadi penanggung jawab lapangan utama, yaitu bertugas sebagai koordinator, penyusun dan juga pelaksana kegiatan khususnya menangani keadaan genting yaitu bencana nasional pandemic Covid 19, sejak awal mula muncul di Indonesia.



infografis 1 Peraturan PPKM Level 4 Kabupaten Wonogiri

Deskripsi realitas pedagang makanan tradisional di Kabupaten Wonogiri

Pengaruh dari pandemi sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, selain itu munculnya kebijakan dan regulasi yang baru memaksa manusia untuk membiasakan pada perubahan yang cepat dan besar. Hal ini selaras dengan pendapat dari (Mawar, 2021) dimana pandemic Covid-19 menjadi penyebab perubahan besar yang terjadi dalam kegiatan manusia, dimana ekonomi menjadi aspek paling jelas terlihat. Hal ini di benarkan pada keadaan terkhususnya pada saat kebijakan pembatasan kegiatan manusia yang imbasnya masyarakat pada awalnya mengalami shock karena perubahan yang terjadi. Hal ini khususnya yang di alami oleh pelaku usaha, pedagang , atau UMKM makanan daerah atau jajanan pasar di Kabupaten Wonogiri. Aspek ekonomi khususnya terkait pada kegiatan manusia mendapatkan pendaatan sehari-hari yang mereka peroleh sangat berbeda antara sebelum dan sesudah adanya kebijakan yang berkaitan pada pandemic covid-19 ini. Banyak factor yang sebenarnya dapat di lihat, dirasakan dan juga kita analisis, misalkan pengurangan yang signifikan kegiatan antar manusia, pengurangan waktu berkegiatan manusia di luar ruangan dan lainnya. Oleh karena itu regulasi atau kebijakan dari pemerintah ini secara tidak langsung mempengaruhi roda perekonomian di masyarakat.

Perbandingan yang signifikan ini sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, dimana setiap harinya jalanan menjadi sepi, tempat wisata tutup, dilarangnya rumah makan atau took beroperasi hingga malam, dan lain sebagainya. Perbandingan antara sebelum adanya kebijakan yang mengatur pembatasan sebagai akibat adanya pndemi covid-19 dapat terasa jelas. Hal ini dirasakan oleh mayoritas infoman pedagang makanan daerah dimana orderan dan pendapatan setiap berjualan yang diterima sangat berkurang hingga menunjukkan hitungan persentase yang lumayan drastis.

Pandemi yang berlangsung membuat proses kegiatan manusia terhambat atau bahkan dibekukan dalam jangka waktu yang termasuk panjang . Misalkan di bidang pendidikan sekolah menjadi dari rumah, tidak ada kegiatan ekonomi yang dijalankan seperti biasa misalkan di kantin atau toko di sekitar sekolah. Selain itu kegiatan perpindahan manusia dari tempat satu ke yang lain atau di sebut sebagai mobilitas hampir tidak ada, sehingga angkutan umum pun tidak ada perputaran ekonomi disana,

selanjutnya pada kegiatan di tempat umum para pedagang kesulitan dalam mencari konsumen karena beberapa factor misalkan dilarangnya masyarakat keluar rumah, dan juga ekonomi yang menghancurkan masyarakat menghemat pengeluarannya sehingga tidak mampu untuk membeli jajanan seperti biasanya.

Regulasi akibat pandemi ini memaksa para pedagang atau pelaku UMKM makanan daerah mencari alternative lain guna bertahan dalam keadaan sulit seperti saat itu. Dimana mereka memutar otak mencari ide atau jalan untuk tetap mendapatkan penghasilan selama pandemic dan juga mengurangi resiko yang akan diterimanya. Hal ini selaras dengan pendapat dari Mangkunegara dalam (Sawaludin, 2020) dimana seseorang akan terdorong dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai upaya bertahan hidup. Karena pekerjaan berdagang merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi karena keadaan yang memaksa produk yang dijual harus habis saat itu juga. Hal ini didasarkan pada sifat makanan daerah yang mayoritas tidak bisa disimpan dengan jangka waktu panjang juga.

Berbagai kendala dan tantangan pun juga dialami bukan dari jumlah penjualan, melainkan regulasi yang memaksa para pedagang menutup gerainya lebih awal, hal ini tentunya pengaruh dari tindakan sebab akibat untuk pedagang agar mengurangi resiko kerugian penjualan, bila memiliki sisa barang yang banyak maka resiko kerugian semakin besar. Kegiatan menutup gerai dagangan lebih cepat biasanya dikarenakan beberapa factor yang pertama, regulasi, yang kedua karena pedagang menganggap pembeli sudah tidak akan ada lagi. Selain itu beberapa pedagang menambahkan atau bahkan merubah jenis dagangannya.

Praktek pelaksanaan PPKM di Indonesia khususnya di daerah seperti di Kabupaten Wonogiri memiliki konsekuensi yang besar dalam pengaruhnya terhadap laju ekonomi. Televisi, media cetak, berita online semuanya masih menyimpan cerita bahwasanya banyaknya pelaku bisnis yang mendapatkan imbas dari beberapa aturan PPKM tersebut. Diantaranya berupa penutupan warung makan, pembatasan orang makan ditempat, pembatasan waktu makan ditempat, dilarangnya warung makan menerima orang makan ditempat, dan terdapat kewajiban untuk hanya menerima orderan untuk take away saja. Selain itu terdapat kebijakan khusus daerah misalkan PPKM di Kabupaten Wonogiri yang menerapkan peraturan jam malam dimana lampu penerangan jalan raya akan dimatikan dari jam 19.00 WIB tanpa terkecuali. Lalu terdapat penutupan jalan raya atau jalan utama sehingga beberapa usaha yang sebelumnya berjualan disitu mau tidak mau pindah.

Kebijakan ini menuai banyak Pro dan kontra dalam masyarakat, hal ini dapat kita lihat atau ulas kembali dengan melihat beberapa informasi yang ada di media massa atau media social waktu itu. Namun didalamnya kebijakan ini mempunyai dua dampak yang bisa digaris bawahi sebagai point penting yang pertama sebagai bentuk kebijakan yang terkenal efektif dan menurunkan angka penyebaran virus, dan yang kedua kebijakan ini dinilai menjadi momok krusial dalam menurunnya laju perekonomian di Indonesia. Tentu dampak kebijakan PPKM ini sangat dirasakan oleh pelaku bisnis kecil atau mikro dan sebenarnya dari bisnis besar pun juga merasakannya., oleh karena itu secara sederhana point yang dapat digaris bawahi bahwa kebijakan PPKM kemarin sedikit banyak mempengaruhi pelaku UMKM.

Sebagai objek utama pedagang makanan daerah merupakan sektor usaha informal yang bergerak dalam bisnis modal bergerak dimana bisanya bahan bakunya harus selalu berputar dan tempat usahanya sering dijumpai di mana saja misalkan pasar, stasiun atau pinggir trotoar jalan raya. Pasar mulai sepi saat kebijakan PPKM mulai di berlakukan dimana merupakan bentuk sebab akibat dari adanya pandemic Covid-19. Roda perekonomian pedagang makanan daerah di Kabupaten Wonogiri kebanyakan terfokus pada pasar di daerah ini, Pasar berperan penting dalam meningkatkan sektor perdagangan maupun perekonomian suatu daerah.

Sehingga terdapat beberapa point-point yang dapat di rangkum efek atau dampak dari adanya PPKM terhadap kelangsungan pedagang makanan daerah di Kabupaten Wonogiri. Yang pertama mengalami penurunan penjualan, penurunan penjualan ini didasarkan pada tingkat order yang semakin mengecil karena kebijakan yang berlaku saat itu untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga kebanyakan masyarakat mungkin lebih memilih untuk membuat atau memasak sendiri makanan di rumah. Yang kedua pedagang mengeluhkan stok bahan yang kurang segar dan keterlambatan stok, hal ini didasari pada aturan PPKM saat itu di berbagai daerah memberlakukan penutupan jalan, sehingga mobilitas atau arus distribusi terhambat. Yang ketiga para pedagang mau tidak mau menutup kios dengan waktu yang lebih singkat, hal ini didasari dua faktor yaitu kebijakan membatasi waktu berjualan yang mengatur kegiatan perdagangan atau kesadaran para pedagang yang menutup dagangannya lebih cepat karena mereka yakin sudah tidak orang yang akan membeli lagi. Yang keempat pilihan bertahan, ganti atau berinovasi produk, hal ini didasari pada upaya pedagang untuk berstrategi dalam bertahan menghadapi kondisi yang sulit saat itu. Berbagai cara pasti akan dilakukan oleh pedagang untuk menggenjot penjualan dan bagaimana pedagang mengikuti permintaan pasar pada saat itu. Kemudian terdapat perubahan kearah maju, dimana beberapa pedagang mulai merambah pada online market, yang mereka pelajari guna mendapatkan keuntungan dari jalur atau lingkup lain.

Hal tersebut menegaskan bahwa beberapa kondisi yang dapat mengharuskan pedagang makanan daerah ini melakukan dan menemukan mekanisme Survival untuk tetap bertahan dalam keadaan yang tidak menentu. Sehingga hal ini dibuktikan dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang makanan daerah di Pasar Wonogiri di Kabupaten Wonogiri, dimana mereka melakukan mekanisme strategi bertahan hidup pada masa pemberlakuan kebijakan PPKM di Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya ada beberapa factor yang berkaitan juga dimana keadaan situasi krisis karena penyebaran virus dan yang kedua keahlian yang dimiliki pedagang tersebut ya sebatas membuat makanan tersebut. Sehingga hal ini penulis mengaitkan studi objek ini dengan teori dari James Scott tentang mekanisme survival untuk mengetahui bagaimana cara pedagang makanan daerah dalam mempertahankan eksistensinya dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berkaitan pada kegiatan usaha mandiri harus bisa bertahan dengan situasi apapun. Yang akhirnya penulis dapat melihat bagaimana tahapan atau pilihan mekanisme strategi bertahan James Scott (Scott, 1981) yaitu terdapat tiga diantaranya mengikat sabuk lebih kencang, dengan kebanyakan mereka memilih untuk hidup berhemat, mengurangi pengeluaran. Lalu yang kedua alternative subsistensi, dimana mereka memiliki beberapa cara yaitu terdapat anggota keluarga lain yang ikut bekerja, melakukan kegiatan tambahan misalkan bertani, bertenak hingga menjadi buruh di tempat lain. Dan yang ketiga relasi atau jaringan, dimana merupakan bentuk strategi dengan memanfaatkan relasi seperti keluarga atau pun buka keluarga misalkan melakukan pinjaman, dan juga meminta bantuan pada tetangga atau teman dekat untuk media pemasaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kebijakan PPKM terhadap strategi bertahan hidup pelaku UMKM makanan tradisional di Kabupaten Wonogiri, maka dapat ditarik beberapa dasar kesimpulan Pelaksanaan PPKM di Kabupaten Wonogiri Sebagai bentuk usaha pemerintah dalam melawan Covid-19 tentunya harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua masyarakat. Karena kebijakan ini lahir guna menjaga kepentingan bersama mengenai kehidupan jangka panjang. Peraturan PPKM ini sebenarnya di buat oleh pemerintah pusat namun di berikan kewenangan oleh pemerintah daerah untuk mengatur detail dalam pendalaman pelaksanaannya. Namun intinya semua kebijakan tentu terdapat konsekuensi didalamnya, sehingga terdapat hasil yang manis setelah kebijakan super ketat itu dijalankan, yang akhirnya kehidupan dan juga kegiatan

masyarakat sekarang ini sudah mulai berjalan dengan normal. Perlunya pelaku usaha makanan tradisional di Wonogiri memerlukan strategi bertahan pada masa PPKM, Setelah adanya pandemic Covid-19 di Indonesia dan di bersamai dengan adanya kebijkana PPKM yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Terlihat beberapa kegiatan manusia yang mengalami imbas atau dampak kemundurannya, secara khusus pada bidang ekonomi yang terlihat dengan jelas mengalami tren penurunan atau lesunya kegiatan ekonomi saat PPKM kemarin berlangsung. Namun para pedagang enggan menyerah dan selalu mencari berbagai cara untuk bertahan di situasi yang tidak menguntungkan. Hal ini sejalan dengan teori strategi bertahan yang di kemukakan oleh James Scott mengenai masyarakat petani yang perlu mempertahankan kehidupannya dari berbagai halangan dan kondisi yang dihadapinya. Maka dari itu para pedagang makanan daerah di Kabupaten Wonogiri sangat penting dan perlu bagi mereka untuk melakukan strategi bertahan hidup selama kebijakan PPKM dan pandemic ini masih berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Scott, J. C. (1981). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Penerbit LP3ES.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Mahadewi, K. J. (2021). Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-19 Dalam Tananan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1879–1895.
- Mawar, D. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–12.
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Lentera Bisnis*, 9(2), halaman 109-120.
- Sawaludin, L. O. B. dan A. U. (2020). Strategi Bertahan Hidup Pedagang Asongan. *Jurnal Neo Societal*, 2503–359, 58–63.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Politeknik Keuangan Negara STAN*, 19(1), halaman 76-86.
- Taufik, A. E. A. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis dan Eksistensi Platform Online. *Jurnal Pengembangan Pariwisata*, 22(01), halaman 21-32.
- Instruksi Bupati, W. (2021). *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease Di Kabupaten Wonogiri*. 9, halaman 1-7.
- Instruksi Gubernur Jawa Tengah. (2021). *Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Provinsi Jawa Tengah*. 2, halaman 1-4.
- Satgas Covid-19. (2021). *Peta Sebaran Covid-19*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>